

DAFTAR PUSTAKA

- Alifah, Farah Dibah. (2016). Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 26 Atas Deviden Wajib Pajak Luar Negeri di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. *E-Jurnal Perpajakan Universitas Airlangga*, 39-50
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan /Atau Pasal 26
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan Dan Diwajibkan Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ /2017
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Penghindaran Persetujuan Pajak Berganda Indonesia dan Singapore. <http://stats.pajak.go.id/index.php/id/p3b/singapura> diakses 24 Maret 2021 19.00.
- Direktorat Jenderal Pajak (2020). Menyelisik Tax Treaty Dengan Singapura. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/menyelisik-tax-treaty-dengan-singapura> diakses 24 Maret 20.00
- Direktorat Jenderal Pajak (2020). Pemotongan Pajak Penghasilan-Pasal 26. <https://pajak.go.id/id/pemotongan-pajak-penghasilan-pasal-26>, diakses 18 Maret 15.00
- Faisol, Sanapiah. (1999). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Aplikasi*. Malang: IKIP
- Hastika, Natasha Graciela. (2019). Keabsahan Elektronik Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. *E-Jurnal Perpajakan Universitas Airlangga*, 33-37

- Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Ratu, Beka. (2018). Penerapan Pengembalian Kelebihan Pemotongan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Pada PT XYZ Surabaya. *E-Jurnal Perpajakan Universitas Airlangga*, 23-31
- Sadar Pajak (2020). e-BUPOT PPh Pasal 23/26. <https://sadarpajak.com/e-bupot-pph-pasal-23-26/>, diakses 17 Mei 23.55
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Republik Indonesia. (2008). Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Yin, Robert K. (2015). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.